



Dialog Antarpemerintah Selatan-Selatan tentang Mewujudkan Nilai Tambah Mineral yang Adil Hasil Utama dan Poin-Poin Penting

Indonesia, 30 November – 4 Desember, 2025



 Natural Resource
Governance Institute

Pembuka

Pada 30 November hingga 4 Desember 2025, delegasi pemerintah dan para mitra berkumpul di Bali, Indonesia, untuk mengikuti Dialog Antarpemerintah Selatan-Selatan tentang Mewujudkan Nilai Tambah Mineral yang Adil. Dialog ini mempertemukan para pejabat dari 10 negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang memiliki cadangan mineral signifikan dan akan memainkan peran sentral dalam perkembangan pasar global bagi teknologi energi bersih serta industri-industri kunci lainnya. Negara-negara tersebut adalah Chile, Republik Demokratik Kongo, Ghana, Indonesia, Meksiko, Mongolia, Maroko, Filipina, Zambia, dan Zimbabwe. Mereka juga didampingi oleh perwakilan dari organisasi antarpemerintah, lembaga penelitian, dan lembaga pembangunan.

Dialog ini diselenggarakan bersama oleh Dewan Ekonomi Nasional Indonesia dan Natural Resource Governance Institute, dengan dukungan dari ViriyaENB. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran

bersama serta memberikan masukan bagi upaya pemerintah. Tujuan dialog ini adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor mineral terhadap pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, peningkatan kapasitas teknologi, serta partisipasi masyarakat lokal yang lebih adil. Meskipun pengalaman masing-masing negara sangat beragam, para peserta selama diskusi sepanjang minggu tersebut mengidentifikasi sejumlah strategi lintas sektor yang utama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat posisi tawar di pasar internasional, serta melindungi lingkungan dan hak-hak warga negara.

Dokumen ini merangkum pokok-pokok kesamaan pandangan yang muncul dari dialog tersebut, serta menawarkan sejumlah pendekatan untuk mendorong pembelajaran berkelanjutan dan koordinasi di antara pemerintah negara-negara Global South guna meningkatkan pembangunan sektor mineral yang adil.



Poin-poin Utama



1 Pendekatan yang terintegrasi sangat penting dalam pengelolaan sektor ini, dibandingkan dengan pendekatan yang menangani proyek satu per satu

Titik kesamaan pandangan yang paling penting di antara para peserta adalah bahwa penciptaan manfaat yang berkelanjutan memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi. Pendekatan ini menempatkan kegiatan pertambangan dan penciptaan nilai tambah, baik melalui penguatan kandungan lokal di sektor hulu maupun melalui pengolahan di sektor hilir, dalam kerangka ekonomi, lingkungan, dan sosial yang lebih luas. Penting bagi pemerintah yang ingin naik dalam rantai nilai untuk mewujudkan ambisi mereka melalui strategi yang sistematis. Strategi ini harus mencakup tujuan di bidang pembangunan industri, energi, perdagangan, diplomasi, iklim, dan keterlibatan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Negara-negara sebaiknya tidak hanya fokus menambah nilai demi nilai itu sendiri, tetapi juga menetapkan tujuan yang jelas untuk pembangunan nasional dan mengukur kemajuan berdasarkan tujuan tersebut. Visi yang terintegrasi ini harus menghubungkan penciptaan nilai tambah mineral tidak hanya dengan pasar ekspor, tetapi juga dengan tujuan jangka panjang transisi energi domestik.

2 Analisis yang sesuai dengan konteks membantu pemerintah memanfaatkan peluang-peluang spesifik yang ditawarkan oleh kondisi geologi, geografi, dan sumber daya yang dimiliki

Lanskap global yang semakin kompleks dan pasar yang sangat terkonsentrasi menunjukkan bahwa negara-negara di Global South perlu mengembangkan strategi nilai tambah yang disesuaikan dengan peluang dan keterbatasan setiap rantai nilai. Tidak semua bentuk nilai tambah layak, diinginkan, atau menjadi prioritas di setiap konteks. Perbedaan dalam pangsa pasar global, kebutuhan infrastruktur, risiko teknologi, dampak lingkungan dan sosial, struktur kelembagaan nasional, tahap pembangunan, serta kebutuhan ekonomi yang lebih luas akan memengaruhi pendekatan pemerintah dalam menambah nilai pada mineral. Pendekatan ini mencakup bagaimana pemerintah membedakan antara peluang jangka pendek yang relatif aman dan pilihan jangka panjang yang berisiko lebih tinggi.

3 Visi jangka panjang perlu bersifat ambisius, namun tetap berkembang secara bertahap

Strategi nilai tambah akan lebih efektif jika berlandaskan visi nasional jangka panjang yang memberikan kepastian bagi investor dan dapat bertahan melampaui siklus politik. Negara-negara yang telah mencapai kemajuan melakukannya dengan menata investasi dan reformasi kebijakan secara bertahap dari waktu ke waktu, sambil menyadari bahwa ketidakpastian dan proses pembelajaran merupakan bagian yang melekat dari transformasi industri. Pendekatan ini menuntut pemerintah untuk menyesuaikan kembali kebijakan seiring dengan perubahan pasar, teknologi, dan kondisi domestik.

4 Pendekatan yang menggabungkan insentif dan ketegasan diperlukan dalam hubungan dengan investor, dengan menyeimbangkan dorongan, aturan yang tegas, serta fleksibilitas

Pemerintah perlu menetapkan aturan tegas dalam hubungan dengan investor untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dan peluang bagi masyarakat. Transparansi informasi dan penerapan standar antikorupsi yang kuat menjadi pendorong utama investasi bertanggung jawab, menarik mitra yang tepat, dan mengarahkan tindakan mereka sesuai tujuan nasional. Pengembangan peluang nilai tambah beserta instrumen pembiayaan yang menyertainya memerlukan komunikasi yang terpercaya dan keterlibatan berkelanjutan antara pemerintah dan perusahaan. Hal ini penting untuk menyelaraskan kepentingan, merancang kebijakan dan insentif yang realistis, serta memfasilitasi pengambilan keputusan tepat waktu melalui pendekatan jangka panjang yang terpadu bagi investor, masyarakat, dan pemerintah.

5 Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia harus bersifat strategis dan konsisten

Nilai tambah yang berhasil membuka berbagai peluang bagi pengembangan keterampilan, lapangan kerja, kepemimpinan, serta imbal hasil finansial bagi masyarakat. Namun, pencapaian ini tidak otomatis terjadi; pemerintah dan mitra sektor swasta perlu menyusun rencana jangka panjang serta alat untuk mengukur kemajuan dalam pembangunan keterampilan warga di berbagai bidang. Beasiswa, penugasan sementara, program gelar dan sertifikasi formal, pelatihan vokasi, pengalaman praktis, serta persyaratan kandungan lokal dapat menjadi komponen penting dari strategi menyeluruh untuk membangun keterampilan seiring peningkatan skala produksi, pengolahan, dan manufaktur nasional.

6 Bersuara Satu: Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah Sangat Vital

Merancang dan melaksanakan strategi nilai tambah yang efektif membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, namun hal ini masih menjadi tantangan di banyak konteks. Tanggung jawab yang terfragmentasi, mandat yang tumpang tindih, dan komunikasi yang tidak konsisten dapat menghambat keselarasan kebijakan pertambangan, energi, dan industri, serta membatasi integrasi pertimbangan lingkungan dan sosial. Pendekatan yang berhasil menggabungkan rantai komando yang jelas dengan mekanisme formal untuk kolaborasi antar-lembaga, didukung oleh komitmen politik yang berkelanjutan.

7 Pendekatan multi-pemangku kepentingan dan komunikasi yang jelas merupakan kunci

Strategi nilai tambah melibatkan berbagai kompromi dan membutuhkan waktu untuk menghasilkan hasil. Bahkan setelah itu, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Strategi juga dapat gagal jika pemerintah tidak melibatkan pemangku kepentingan nasional dan lokal secara efektif, sehingga kebijakan menjadi rentan terhadap tekanan untuk berubah arah. Oleh karena itu, konsultasi yang bermakna dan keterlibatan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting. Komunikasi yang jelas mengenai tujuan, jadwal, dan manfaat yang diharapkan, terutama di negara-negara dengan sejarah janji terkait sumber daya yang tidak terpenuhi, dapat membantu membangun kepercayaan. Narasi yang transparan dan berbasis data yang disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dapat menjaga dukungan politik sepanjang siklus pemilihan serta memperkuat kredibilitas komitmen jangka panjang.

8 Sistem keterlacakan yang kuat, yang mencakup pertambangan skala besar maupun kecil, sangat penting untuk pembangunan rantai nilai yang adil

Strategi nilai tambah untuk mineral kritis tidak akan berhasil kecuali secara sistematis mengintegrasikan keterlacakan dan tata kelola yang bertanggung jawab dalam pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) sebagai elemen inti dalam pengembangan rantai nilai, bukan sekadar sebagai persyaratan kepatuhan tambahan. Keterlacakan merupakan alat penting untuk mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab dan membangun kepercayaan dalam rantai nilai. Hal ini pada gilirannya membantu menarik berbagai investasi dan mendukung terciptanya kondisi yang adil antara investor dan masyarakat dalam menentukan bagaimana investasi pertambangan memenuhi harapan masyarakat setempat. Sistem keterlacakan, baik berbasis digital, regulasi, maupun pasar, bergantung pada partisipasi yang bermakna dan keselarasan semua pelaku rantai nilai, termasuk penambang rakyat, koperasi,

pedagang, pengolah, produsen hilir, regulator, dan masyarakat terdampak. Jika pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) tidak termasuk dalam kerangka keterlacakan, risiko praktik informal tetap tinggi, integritas data dapat terganggu, dan partisipasi yang adil dalam segmen bernilai tinggi dari rantai pasok mineral kritis akan terhambat.

9 Negara-negara pengimpor mineral dan lembaga internasional harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka demi terciptanya rantai nilai yang stabil, efisien, dan ramah lingkungan

Permintaan global akan mineral terus meningkat, dan upaya untuk mendiversifikasi rantai pasok semakin intensif. Hal ini membuka peluang untuk membangun aktivitas rantai nilai di lokasi baru, termasuk di negara-negara Global South. Namun, negara-negara kaya mineral di Global South menghadapi banyak hambatan dalam mendorong penciptaan nilai tambah, seperti penggunaan kontrol ekspor yang meluas, subsidi industri skala besar, dan tindakan negara-negara besar yang membatasi ruang kebijakan. Mempertahankan ketidakadilan dalam rantai nilai global tidak menguntungkan siapa pun. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan publik di negara produsen, meningkatkan risiko gangguan pasokan, dan membuat negara-negara melewatkan peluang penciptaan nilai tambah yang bisa menurunkan biaya, mengurangi emisi, serta mendukung rantai nilai yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

10 Netralitas Strategis dan Aliansi Semakin Penting

Netralitas strategis dan kemitraan yang beragam semakin penting bagi negara-negara Global South seiring meningkatnya manuver geopolitik. Kerja sama Selatan-Selatan menjadi mekanisme kunci untuk mewujudkan netralitas tersebut sekaligus mempertahankan otonomi kebijakan nasional. Dengan berkoordinasi, bukan bersaing, negara-negara dapat memperkuat daya tawar mereka dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal. Area kerja sama meliputi standar, pengembangan keterampilan, infrastruktur regional, dan pembelajaran bersama yang berkelanjutan.

11 Pembelajaran Selatan-Selatan yang lebih mendalam diperlukan untuk membuka peluang kerja sama dan inovasi

Meskipun perhatian global terhadap mineral semakin meningkat, ruang untuk pertukaran informasi yang terbuka, rinci, dan praktis di antara pemerintah negara-negara Global South masih terbatas. Pembelajaran antarpemerintah lintas negara dapat membantu mengatasi tantangan bersama, mengurangi asimetri informasi dengan negara-negara konsumen utama, dan mendukung inovasi kebijakan pada isu-isu penting seperti peningkatan teknologi, strategi kemitraan, kawasan lindung atau zona larangan, pengembangan sumber daya manusia, keterlacakan, pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM), kebijakan pajak, dan koordinasi antar-lembaga pemerintah. Dialog ini juga menyoroti minat untuk terus melakukan keterlibatan dan kerja sama guna membangun kelanjutan dari pertukaran yang telah dimulai di Bali.



Lampiran - Daftar Peserta

Di bawah ini adalah daftar lengkap peserta dalam Dialog Antar-Pemerintah Selatan-Selatan tentang Mewujudkan Nilai Tambah Mineral yang Adil, yang diselenggarakan pada 30 November hingga 4 Desember 2025 di Bali dan Teluk Weda, Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Aturan Chatham House, dan pandangan yang disampaikan dalam laporan ini tidak selalu mencerminkan pandangan individu yang hadir maupun institusi tempat mereka bekerja.

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Kewarganegaraan
Delegasi Negara				
1.	Maurice Miema	Direktur Jenderal	Centre d'Expertise d'Evaluation et de Certification, Republik Demokratik Kongo	Republik Demokratik Kongo
2.	Martin Kwaku Ayisi	Penasihat Teknis Menteri	Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya Alam	Republik Ghana
3.	Mohamed Ouhmed	Sekretaris Jenderal	Kementerian Transisi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan, Kerajaan Maroko	Kerajaan Maroko
4.	Abdessamad El Attillah	Wakil Direktur Geologi, Pertambangan, dan Hidrokarbon.		
5.	Edward Shabani	Perencana Ekonomi Utama	Kementerian Pertambangan dan Pengembangan Mineral, Republik Zambia	Republik Zambia
6.	Gloria Magombo	Sekretaris Tetap	Kementerian Pertambangan dan Pengembangan Mineral, Republik Zambia	Republik Zambia
7.	Shorai Kavu	Wakil Direktur Pengembangan Ketenagalistrikan		
8.	Atty. Dante R. Bravo	Ketua	Asosiasi Industri Nikel Filipina	Republik Filipina
9.	Charmaine Olea-Capili	Direktur Eksekutif		
10.	Arif Havas Oegroseno*)	Wakil Menteri Luar Negeri)*	Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia	Republik Indonesia
11.	Ida Bagus Made Bimantara	Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN		
12.	Niwa Rahmad Dwitama	Pejabat Diplomatik		
13.	Meidy Katrin Lengkey	Sekretaris Jenderal	Asosiasi Penambang Nikel Indonesia	

14.	Melscho Mendbayar	Kepala Departemen Kebijakan Industri	Kementerian Industri dan Sumber Daya Mineral	Negara Mongolia
15.	Sandagdorj Nyamdorj	Spesialis Mineral Kritis	Erdenes Mongol Group	
16.	Francisca Bastías	Analisis pada Departemen Urusan Luar Negeri	Kementerian Pertambangan Republik Chile	Republik Chile
17.	Nicolás Springmüller Pinto	Direktur Pelaksana	Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) Shanghai	
18.	Ivan Couso	Kepala Staf Wakil Presiden Eksekutif	Perusahaan Pertambangan Nasional Chile (ENAMI)	
19.	Diana Marel Ruiz	Kepala Eksplorasi, Ekstraksi, dan Pengolahan	Litio para México	Negara Meksiko Serikat
Organisasi Antarpemerintah				
20.	Pedro Manuel Moreno	Wakil Sekretaris Jenderal	Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan	Perserikatan Bangsa-Bangsa / Swiss
21.	Cevat Tansug Ok	Pejabat Urusan Ekonomi pada Seksi Komoditas Ekstraktif		Republik Turki
22.	Marit Kitaw	Pejabat Urusan Ekonomi, Kepala Sektor Mineral	Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afrika	Republik Demokratik Federal Ethiopia
23.	Massimo Geloso Grosso	Kepala Kantor OECD di Jakarta	Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi	
24.	Marie Desiree Martine Isabelle Ramdoo	Direktur Sekretariat IGF	Forum Antarpemerintah tentang Pertambangan, Mineral, Logam, dan Pembangunan Berkelanjutan (IGF)	Republik Prancis
25.	Benjamin Boakye	Direktur Eksekutif	Pusat Kebijakan Energi Afrika	Republik Ghana
26.	Anannya Das Banerjee	Direktur Rekanan	Dewan Pengembangan Mineral Kritis di Global South	Republik India
Lembaga Pemikir				
27.	Martín Latorre	Peneliti	Pusat Energi, Universidade de Chile	Republik Chile
28.	Prof. Diego A. von Vacano	Profesor pada Departemen Ilmu Politik	Sekolah Pemerintahan Bush, Universitas Texas A&M	Negara Plurinasional Bolivia

29.	Hasrul Hanif	Manajer Pusat Pembelajaran Industri Ekstraktif	Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada	Republik Indonesia
30.	Roes Ebara Gikami Lufti	Asisten Peneliti Junior	Institut Riset Ekonomi dan Sosial, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia	
31.	Ellin Victoria	Penerima Beasiswa	GEM Co., Ltd.	
Badan Pembangunan / Organisasi Filantropi				
32.	Cassady Walters	Direktur Pelaksana untuk Energi	Yayasan Rockefeller	Amerika Serikat
33.	Suzanty Sitorus	Direktur Eksekutif	Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB)	Republik Indonesia
34.	Fajrin Hanggoro	Manajer Program		
35.	Najla Attahiya	Dukungan Program		
Penyelenggara				
36.	Patrick Heller	Direktur Program	Natural Resource Governance Institute	Amerika Serikat
37.	Maria Paz Gonzalez	Pejabat Program Senior		Republik Chile
38.	Nafi Quarshie	Direktur Afrika		Republik Ghana
39.	Thomas Scurfield	Analisis Ekonomi Senior Afrika		Britania Raya
40.	Matteo Molineris	Pejabat Pengembangan Kapasitas		Keharyapatihan Luksemburg
41.	Frenky Simanjuntak	Perwakilan Indonesia		Republik Indonesia
42.	Luhut B. Pandjaitan	Ketua		
43.	Septian Hario Seto	Sekretaris Eksekutif		
44.	Tubagus Nugraha	Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi		
45.	Rifky Setiawan	Kepala Sekretariat		
46.	Nataneil Adhynagara Horansil			

Tentang Dokumen Ini

Dokumen 'Hasil Utama dan Poin-Poin Penting' ini mencerminkan isu-isu yang muncul selama Dialog Antarpemerintah Selatan-Selatan tentang Mewujudkan Nilai Tambah Mineral yang Adil, yang diselenggarakan di Bali dan Teluk Weda, Indonesia, pada 30 November hingga 4 Desember 2025. Daftar lengkap peserta tercantum dalam Lampiran 1. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai Aturan Chatham House, sehingga pandangan yang disampaikan dalam laporan ini tidak selalu mencerminkan pandangan individu peserta maupun instansi tempat mereka bekerja. Para peserta berikut berkontribusi langsung dalam penyusunan dan finalisasi dokumen ini: Septian Hario Seto, Natan Adhynagara, Martin Kwaku Ayisi, Anannya Das Banerjee, Benjamin Boakye, Niwa R. Dwitama, Maria Paz Gonzalez, Massimo Geloso Grosso, Patrick Heller, Shorai Kavuu, Marit Y. Kitaw, Meidy Katrin Lengkey, Matteo Molineris, Nafi Quarshie, Thomas Scurfield, Frenky Simanjuntak, dan Diego von Vacano.

Tentang NRGi

Natural Resource Governance Institute adalah organisasi independen dan nirlaba yang mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi dan inklusif terkait sumber daya alam serta transisi energi. Kami bermitra dengan para pembaharu di pemerintahan dan masyarakat sipil untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang adil, berdasarkan bukti serta prioritas warga di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya www.resourcegovernance.org

Tentang Dewan Ekonomi Nasional

Dewan Ekonomi Nasional adalah lembaga penasihat presiden yang memberikan nasihat kebijakan ekonomi strategis kepada Presiden Indonesia. Dewan Ekonomi Nasional memiliki mandat untuk memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Presiden dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis serta inisiatif utama di sektor ekonomi.

